

Soal PPS Bagian 3

1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal & ayat berapa?

- a. Pasal 9 ayat (1)
- b. Pasal 9 ayat (2)
- c. Pasal 10 ayat (1)
- d. Pasal 10 ayat (2)
- e. Pasal 10 ayat (3)

Jawaban: A

2. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan...

- a. Prinsip-prinsip check and balances
- b. Sistem proporsional terbuka
- c. Asas penyelenggaraan negara yang baik (good governance)
- d. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak
- e. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan

Jawaban: E

3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkan pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni

- a. 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
- b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara
- c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara

- d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
- e. 8 bulan sebelum dan 3 b

1. Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum diatur dalam

- a. Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- b. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- d. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- e. Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Etik Penyelenggara Pemilu

Jawaban: D

4. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan
- e. menetapkan calon camat yang telah memenuhi persyaratan;

Jawaban: B

5. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama...

- a. 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
- b. 4 (empat) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
- c. 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
- d. 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
- e. 7 (tujuh) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas

Jawaban: A

6. Dalam hal anggota KPU Provinsi dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota yang bersangkutan...

- a. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah diputuskan oleh DKPP
- b. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu provinsi
- c. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapat surat keterangan dari Pengadilan Negeri
- d. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi

Jawaban: D

7. Penggantian antarwaktu anggota KPU yang berhenti dilakukan dengan ketentuan ...

- a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
- b. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Tim seleksi
- c. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya sesuai usulan presiden
- d. dilakukan seleksi ulang

Jawaban: A

8. Anggota KPU Provinsi berhenti antar waktu karena....

- a. diberhentikan dengan tidak hormat
- b. melakukan pelanggaran
- c. tidak menghadiri pleno
- d. mendapatkan peringatan keras dari DKPP

Jawaban: A

9. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkan pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni :

- a. 10 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
- b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara
- c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara
- d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara

Jawaban: D

10. hak-hak penyandang disabilitas dalam kepemiluan secara umum Dilindungi dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 yaitu pasal

- a. pasal 3
- b. pasal 4
- c. pasal 5
- d. Pasal 6
- e. pasal 7

Jawaban: C

11. Berikut ini yang termasuk dalam jajaran Bawaslu adalah

- a. PPK
- b. KPPS
- c. PPLN

d. PTPS

e. Tps

Jawaban: D

12. Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali....

a. Adil

b. Terbuka

c. Bebas

d. Langsung

e. Rahasia

Jawaban: B

13. hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilihan secara umum Dilindungi dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 yaitu pasal

a. pasal 3

b. pasal 4

c. pasal 5

d. Pasal 6

e. pasal 7

Jawaban: C

14. Berikut ini yang termasuk dalam jajaran Bawaslu adalah

a. PPK

b. KPPS

c. PPLN

d. PTPS

e. Tps

Jawaban: D

15. Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali....

- a. Adil
- b. Terbuka
- c. Bebas
- d. Langsung
- e. Rahasia

Jawaban: B